

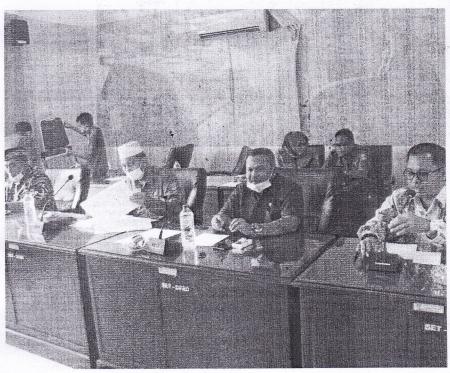
SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN **BPK SUMBAR**

2 1

KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	7

Tanggal								$\overline{}$											_											
1	2	3	4	5	6	7	8	(9)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ви	ılan		1						~																			*		
1	2	3	4	5	(6	7	8	9	10	11	12																		

Bahas THL, DPRD Hearing dengan Bupati Dewan: Solusi yang Ditawarkan Bisa Menjadi Obat



Bupati Pasbar, Hamsuardi, wakil ketua DPRD Pasbar, Endra Yama Putra, Ketua Komisi I Rosdi, duduk bersama saat mengelar Hearing tentang THL

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbat), gelar dengar pendapat dengan Bupati Pasbar Hamsuardi dan kepala OPD terkait pembahasan kelanjutan Tenaga Harian Lepas (THL) setelah di rumahkan di kantor dewan Padang Tujuh, Senin (7/6). Selain kepala OPD, hadir dalam dengar pendapat tersebut ketua komisi untuk mencari jalan keluar di tengah pandemi Covid-19 yang semakin mengganas dan menyedot anggaran.

semakin mengganas dan menyedot anggaran.
Wakil Ketua DPRD Pasbar Dali-yus K yang memimpin sidang dengar pendapat tersebut ber-sama Wakil Ketua Endra Yama Putra mengatakan, jika apa yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI. Selain itu, THL sudah melebihi kapasitas dari beban

melebihi kapasitas dari bebai kerja.

"Tenaga kerja kita sudah terlalu gemuk di Pemda hingga ada indi-kasi temuan dari BPK. BPK mere-komendasikan kepada Pemda untuk menganalisa jabatan di seluruh OPD. Namun, terlepas dari itu semua kita harus memikirkan

juga bagaimana nasib THL ini ke depan," kata Daliyus K. Selain itu, semenjak dari 2019 lalu APBD Pasbar selalu mengalalu APBD Pasbar selalu menga-lami penurunan, begitu juga tahun 2020 hingga tahun inf. Sebagai wakil rakyat la meminta kepada bupati untuk secepatnya memanggil THL yang memiliki kemampuan atau skil, yang sudah lama bertugas, hingga disiplin. "Kami harapkan kepada bupati untuk memberikan kepastian ke-pada THL yang sudah kami usulkan

tadi, Jumlah THL yang sudah di SK itu sekitar 3.042 termasuk guru, administrasi, hingga tenaga kese-hatan. Diperkirakan yang diru-mahkan tidak lebih dari 64 persen.

"Kita merumahkan IHL itu atas rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI karena sudah kelebihan kapasitas. Namun, kita tidak seluruhnya merumahkan mereka. Tenaga kerumahkan mereka. Tenaga kesehatan, guru, sopir, Sespri, petugas kebersihan, Satpol PP yang bertugas dalam pengamanan, dan pemadam kebakaran masih berdinas dan tenaga teknis lainnya masih bertugas. Kita melakukan semua itu sesuai juga dengan analisa jabatan, fungsi jabatan. Kita juga minta kepala OPD untuk menganalisis itu ke depan," ujar Hamsuardi.

Menurut bupati ada masukan masukan dewan yang disam-masukan dewan yang disam-masukan dewan yang disam-

Menurut bupati ada masukan masukan dewan yang disampaikan dalam dengar pendapat tersebut seperti mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh THL, lama bertugas, serta disiplin dalam bekerja. "Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita di dewan akan kita pertimbangkan,"ucap Hamsuardi. (end)